

MILITER DAN KONSTRUKSI IDENTITAS NASIONAL: ANALISIS BUKU TEKS PELAJARAN SEJARAH SMA MASA ORDE BARU

Hieronimus Purwanta

Jurusan Sejarah, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
purwantah@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of the military in constructing national identity through history lesson textbooks for high schools in the period of New Order government. The move is motivated by the understanding that history lesson textbooks are important media to instill a national identity. The research method used was qualitative through content analysis of history lesson textbooks. The analysis focused on historical narratives about the revolution of independence (1945-1950). The results show that the narratives in textbooks are influenced by the views of the military. It can be seen from the militaristic narratives and heroification of military figures. On the other hand, the roles of political figures are negated and distorted.

Keywords: history, history lesson, textbook, military, heroification, distortion, negation

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud menganalisis pengaruh kelompok militer dalam pembentukan identitas nasional melalui buku teks pelajaran sejarah untuk SMA pada masa pemerintahan Orde Baru. Langkah itu dimotivasi oleh pemahaman bahwa buku teks pelajaran sejarah merupakan media yang penting untuk menanamkan identitas nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui analisis isi buku teks pelajaran sejarah. Analisis dilakukan terhadap narasi sejarah tentang revolusi kemerdekaan (1945-1950). Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi dalam buku teks dipengaruhi oleh pandangan kelompok militer. Hal itu antara lain dapat disimak dari narasi yang bersifat militeristik dan pemahlawanan (heroifikasi) tokoh-tokoh militer. Di lain pihak, peran tokoh-tokoh politik dinegasi dan ditenggelamkan.

Kata kunci: sejarah, pelajaran sejarah, buku teks, militer, heroifikasi, distorsi, negasi.

PENDAHULUAN

Secara etimologis, identitas nasional merupakan penggabungan dua kata, yaitu "identitas" dan "nasional". Kata identitas berasal dari bahasa Inggris *identity* yang dapat dimaknai sebagai ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Identitas memiliki fungsi sangat penting, karena memberikan penjelasan yang relatif benar dan tepat. Tanpa

identitas, sesuatu akan sulit diidentifikasi dan digali informasi yang jelas, benar dan tepat. Kartodirdjo (2005) menjelaskan pentingnya identitas dengan menganalogikan pada orang yang kehilangan ingatan. Analogi yang dikemukakan Kartodirdjo tersebut berlaku tidak hanya pada tataran individual atau perseorangan, tetapi juga pada tataran kolektif, baik keluarga, etnik maupun bangsa. Dari sudut pandang ini, tanpa memiliki identitas, bangsa akan tidak memiliki akar untuk

menghidupi aktivitas, vitalitas dan kreativitasnya (Wiriaatmadja, 1992: 68).

Kata ke dua adalah “nasional” yang merujuk pada konsep kebangsaan. Pada kasus bangsa Indonesia, pengertian nasional secara legal dan formal berlandas pada proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari sudut pandang ini pengertian nasional dapat diidentikkan dengan pengertian Indonesia. Pada penelitian ini proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 ditempatkan sebagai hari kelahiran Indonesia, dengan tanpa mengesampingkan proses pembentukannya yang berlangsung lama sebelumnya. Secara filosofis, identitas keindonesiaan yang telah dinyatakan pada saat proklamasi tersebut akan tetap berlaku, meski tanpa ada pengakuan dari pihak lain.

Benedict Anderson (1991) menempatkan negara kebangsaan sebagai *imagined community* yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi komunitas imajiner. Berbeda dengan komunitas yang nyata di mana anggotanya saling kenal dan secara intensif saling berinteraksi, *imagined community* merupakan komunitas yang anggotanya secara garis besar dapat dikatakan tidak saling kenal serta tidak pernah saling bertemu dan berinteraksi secara langsung. Dari sudut pandang inilah maka negara kebangsaan ditempatkan sebagai komunitas yang “tercita dan tercipta” kan.

Penempatan negara kebangsaan sebagai komunitas yang terciptakan, karena keberadaannya sebagai hal yang hendak diwujudkan bersama oleh komunitas-komunitas di bawahnya. Renan mengajukan pandangan bahwa terdapat dua unsur yang menjadi prinsip spiritual negara bangsa. Pertama adalah sejarah yang berisi pengalaman-pengalaman bersama dan menjadi ingatan kolektif, sehingga menumbuhkan solidaritas sebagai pewaris berbagai

nilai yang dihidupi sampai sekarang dan pemilik nasib yang sama. Unsur ke dua adalah keinginan untuk hidup bersama, kehendak untuk secara bersama mempertahankan dan mengembangkan berbagai warisan masa lampau (Renan, 1996: 58).

Pada kutipan di atas, Renan secara jelas menyatakan bahwa bangsa, sebagaimana perseorangan, merupakan hasil dari masa lampau yang panjang dan penuh pengorbanan dan kebaktian. Di antara semua kebudayaan, budaya para leluhur adalah yang paling sah, karena para leluhurlah yang membuat kita seperti sekarang ini. Masa lampau orang-orang besar yang heroik merupakan modal sosial tempat bersemainya gagasan tentang negara bangsa. Memiliki kebesaran masa lampau dan semangat untuk secara bersama membuat keberhasilan besar merupakan hal yang mendasar sebagai rakyat.

Selain sebagai cita-cita bersama, negara kebangsaan juga menjadi citra bersama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008: 286) kata citra diartikan sebagai gambaran atau rupa. Gambaran tersebut bukan dalam arti nyata, tetapi lebih merupakan aktivitas mental. Pada Webster Dictionary penjelasan lebih detail diberikan untuk kata “*image*” sebagai “*a mental conception held in common by members of a group and symbolic of a basic attitude and orientation*” atau “*a popular conception (as of a person, institution, or nation) projected especially through the mass media*” (<http://www.merriam-webster.com/dictionary/image?show=0&t=1286555314>). Dalam konteks ini, citra merupakan gambaran yang mengendap pada pikiran warga bangsa tentang negara bangsa Indonesia dan dibangun melalui informasi dari media.

Media berperan sangat penting dalam penumbuhkembangan identitas nasional tersebut. Anderson yang mengkaji tentang peran media cetak da-

lam nasionalisme Eropa, antara lain menjelaskan sebagai berikut.

...the development of print-as-commodity is the key to the generation of wholly new ideas of simultaneity, still, we are simply at the point where communities of the type 'horizontal-secular, transverse-time' become possible. Why, within that type, did the nation become so popular? The factors involved are obviously complex and various. But a strong case can be made for the primacy of capitalism (Anderson, 1991: 37).

Dari kutipan tersebut dapat dipahami penjelasan Anderson bahwa perkembangan komoditas cetak merupakan kunci lahirnya generasi yang memiliki gagasan yang sungguh-sungguh baru, dimana komunitas bertipe "horisontal-sekuler, melintang waktu" menjadi mungkin diwujudkan. Faktor yang menjadikan gagasan tentang negara bangsa sangat populer pada masyarakat tipe tersebut adalah kompleks, tetapi terutama adalah hasil atau produk dari kapitalisme. Dari sudut pandang ini, komoditas cetak merupakan industri yang berkembang di bawah sistem kapitalisme, sehingga secara tidak langsung nasionalisme juga merupakan produk kapitalisme.

Tentu saja media cetak bukan merupakan faktor penyebab tunggal lahir dan berkembangnya nasionalisme. Pada kasus nasionalisme Indonesia yang sebagian besar rakyatnya tidak media cetak *minded*, komunikasi terjadi dalam berbagai cara, antara lain melalui media cetak, radio, rapat-rapat akbar dan berita dari mulut ke mulut.

Kesadaran sebagai warga bangsa merupakan sumber bagi lahir dan berkembangnya identitas nasional. Oleh karena negara bangsa merupakan *imagined community*, maka identitas nasional pada umumnya bersifat abstrak dan berkembang dari waktu ke waktu. Sartono Kartodirdjo berpendapat bahwa

identitas nasional memiliki ciri pokok: historisitas, keunikan dan partikular. Selanjutnya dia menjelaskan:

Historisitas sebagai ciri utama sebenarnya inheren pada identitas sebagai tumpuan pengalaman kolektif, tidak lain karena pengalaman itu berakumulasi lewat proses historis atau perkembangan. Proses itu terjadi secara unik yaitu bagaimana sebenarnya terjadi dan menghasilkan produk yang kita kenal sebagai identitas. Hasil itu mau tidak mau merupakan hal yang khusus atau partikularitas. Subjektivitas menonjol apabila identitas itu ditempatkan dalam hirarkhi identitas-humanitas-universalitas (Kartodirdjo dalam Depdikbud, 1990: 56).

Dari pandangan Kartodirdjo tentang ciri pokok identitas nasional, dapat diambil pemahaman bahwa sejarah memiliki peran sentral dalam menarasikan pengalaman kolektif yang menjadi sumber bagi lahirnya identitas nasional. Dengan kata lain, sejarah memiliki tanggungjawab untuk mewacanakan identitas nasional melalui eksplanasi tentang pengalaman kolektif yang dilakukannya dalam historiografi yang berupa sejarah nasional dan semua turunannya, termasuk buku teks pelajaran sejarah.

Berdasar pentingnya peran dalam mewacanakan identitas nasional, tidaklah mengherankan apabila berbagai pihak kepentingan berusaha terlibat dalam penyusunan sejarah nasional dan terutama penyusunan buku teks pelajaran sejarah. Salah satu pihak yang merasa berkepentingan dalam penyusunan buku teks pelajaran sejarah di Indonesia pada periode Orde Baru adalah militer. Oleh karena itu, sesuai dengan judul, penelitian ini akan memfokuskan diri untuk mengkaji pengaruh militer dalam mengkonstruksi identitas nasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan buku teks pelajaran sejarah untuk SMA sebagai subjek kajian. Penelitian mengkaji 9 buku teks pelajaran sejarah yang digunakan dalam pembelajaran pada 3 periode kurikulum nasional, yaitu 1975, 1984 dan 1994. Adapun peristiwa sejarah yang dikaji difokuskan pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1950), dengan pertimbangan bahwa militer Indonesia mewacanakan “semangat 1945” sebagai ikon penting mereka. Pengkajian terhadap kehadiran kepentingan militer dilakukan dengan menganalisis term-term superior, baik dalam bentuk kata, kalimat maupun frasa. Term-term superior itu “*not only the object of a particular knowledge, but also the object of a vision*” (Spivak dalam Derrida, 1997: lviii), sehingga ditempatkan sebagai penanda kehadiran kelompok kepentingan (Derrida, 1997: 12); serta term-term inferior yang difungsikan untuk menegasikan pihak-pihak lain (*others*). Penegasian dapat berupa ungkapan yang menyalahkan, menpenjajatkan maupun mengorbankan pihak-pihak yang dianggap tidak sejalan dengan kelompok kepentingan yang sedang berkuasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Militer dalam konsepsi Orde Baru bertanggungjawab atas pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, kehadiran kepentingannya dapat ditengarai dari pengutamaan narasi tentang pertahanan dan keamanan. Dalam buku teks pelajaran sejarah, kehadiran kepentingan militer antara lain tampak dari menonjolnya narasi tentang konflik fisik. Di antara berbagai peristiwa sepanjang periode revolusi kemerdekaan Indone-

sia, yang paling menonjol dibahas adalah konflik fisik antara Indonesia dengan bangsa-bangsa asing, terutama Jepang, Sekutu (Inggris) dan Belanda. Pengutamaan konflik fisik dapat disimak antara lain pada judul bab yang merepresentasikannya, seperti “Perang Kemerdekaan” (Siswoyo, 1979: 192; Notosusanto dkk., 1981: 97; 1992: 127; dan Moedjanto dkk., 1992: 91). Dengan judul “Perang Kemerdekaan” pengarang bermaksud menyampaikan pesan bahwa sebagai besar konflik yang terjadi dalam bentuk konflik terbuka atau perang.

Tidak hanya pada judul bab, penonjolan konflik fisik juga terdapat pada isi buku teks pelajaran sejarah. Ditinjau dari genetika historis, konflik antara Indonesia dengan bangsa-bangsa asing pada periode revolusi kemerdekaan terutama dikarenakan oleh adanya perbenturan kepentingan. Di satu pihak, Indonesia digambarkan sebagai bangsa merdeka dan eksistensinya sah secara hukum internasional. Idris (1979, 65-66) dengan mengutip Piagam San Fransisco mengambil kesimpulan bahwa “Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 memiliki kedudukan yang kuat baik nasional maupun internasional, lebih-lebih bahwa kerajaan Belanda sendiri turut serta sebagai penandatangan Piagam San Fransisco/Piagam PBB 26 Juni 1945 itu”.

Di pihak lain, Jepang dan Sekutu memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan keduanya yang mengakibatkan terjadinya benturan dengan kepentingan Indonesia, digambarkan oleh Soewarso (1986: 87) sebagai berikut.

Sesudah Proklamasi kemerdekaan dicanangkan, perjuangan bangsa Indonesia justru makin bertambah berat, karena kemerdekaan yang telah diproklamasikan harus diselamatkan dari rongrongan kekuasaan asing yang tidak menghendaki bangsa In-

donesia menjadi bangsa merdeka dan berdaulat. (1) Jepang, yang telah kalah perang, secara de facto tetap berkuasa di Indonesia lengkap dengan persenjataannya. Mereka diharuskan mempertahankan *status quo* seperti keadaan pada tanggal 15 Agustus 1945 hingga Pasukan Sekutu tiba di tanah air kita. Proklamasi Kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945 dianggap sebagai pemberontakan yang akan mengubah *status quo*. Oleh sebab itu gerakan kemerdekaan rakyat Indonesia harus ditumpas; (2) Kedatangan pasukan Sekutu di Indonesia akhir September 1945 pada hakekatnya akan mengembalikan kekuasaan Belanda. Menurut anggapan mereka Indonesia adalah "milik" Belanda yang direbut oleh Jepang pada waktu perang. Berhubung perang telah selesai dan Jepang telah kalah, maka Indonesia harus dikembalikan kepada "pemiliknya". Proklamasi kemerdekaan bangsa kita dianggap sebagai perbuatan sekelompok teroris yang harus dihancurkan.

Pada kutipan di atas, pengarang menjelaskan bahwa Jepang berkepentingan untuk "mempertahankan *status quo* seperti keadaan pada tanggal 15 Agustus 1945 hingga Pasukan Sekutu tiba". Selain itu, Inggris sebagai pihak yang mewakili Sekutu digambarkan memiliki kepentingan untuk "mengembalikan kekuasaan Belanda". Kedua kepentingan tersebut tidak memberi ruang untuk kemerdekaan Indonesia.

Pemahaman terhadap peta kepentingan menjadikan para pemimpin nasional Indonesia sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Akan tetapi, kehati-hatian tersebut mengakibatkan kebijakan mereka sering mengecewakan golongan pemuda. Salah satunya adalah kebijakan tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang digambarkan sebagai berikut.

BKR dibentuk karena Pemerintah sengaja tidak mau segera membentuk tentara nasional berdasarkan pertimbangan politik. Pimpinan Nasional (Pemerintah) berpendapat bahwa pembentukan tentara nasional pada saat itu akan mengundang pukulan gabungan Tentara Serikat dan Jepang. Diperkirakan bahwa kekuatan nasional belum mampu menghadapi pukulan tersebut. Kebijakan Pemerintah ini tidak memuaskan golongan pemuda. Mereka mengharapkan dibentuknya tentara nasional sebagai tulang-punggung pertahanan keamanan negara yang baru. Karena itu sebagian golongan pemuda membentuk badan-badan perjuangan atau laskar-laskar bersenjata. Kemudian terbentuklah badan-badan perjuangan seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API), Pemuda Republik Indonesia (PRI), Barisan Pemuda Indonesia (BPI) dan lain-lain, hampir di seluruh pelosok tanah air. Para bekas anggota Peta dan heiho pada umumnya memasuki BKR di daerah masing-masing dan bertekad untuk menjadikan badan ini sebagai alat perjuangan bersenjata untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Mereka menganggap dirinya *pejuang*, seperti juga pemuda-pemuda lainnya (Notosusanto, 1981, jilid 3: 98).

Dari kutipan di atas tampak pengarang berpendapat bahwa pembentukan BKR adalah bentuk ketidakberediaan pemerintah pusat untuk membangun tentara nasional. Pengarang terlihat kurang setuju dengan kebijakan tersebut. Hal itu dapat disimak dari pernyataan pengarang bahwa "Pemerintah sengaja tidak mau segera membentuk tentara nasional berdasarkan pertimbangan politik" dan kekhawatiran "akan mengundang pukulan gabungan Tentara Serikat dan Jepang", tanpa merincinya lebih lanjut. Pengarang lebih berpihak pada golongan pemuda yang kemudian membentuk

badan-badan perjuangan, yang dikatakannya terjadi di “hampir di seluruh pelosok tanah air”.

Keberpihakan Notosusanto (1981) dijadikan pegangan oleh para pengarang buku teks pelajaran sejarah pada periode selanjutnya. Keberpihakan para pengarang buku teks terhadap pandangan pemuda itu semakin terlihat antara lain dari uraian mereka yang lebih menonjolkan konflik terbuka antara pemuda dengan kekuatan asing.

Keteguhan pemuda dalam menegakkan kedaulatan negara tercermin pula dalam dua kasus di dua kota besar pada waktu yang bersamaan, yakni tanggal 19 September 1945. Satu peristiwa terjadi di Jakarta, berupa rapat raksasa menyambut proklamasi kemerdekaan di Lapangan Ikada. Rapat itu dipelopori oleh para pemuda Menteng Raya 31 dan para mahasiswa asrama Prapatan 10. Kendati tentara Jepang berusaha menggagalkannya dengan pasukan lapis baja, rakyat tetap membanjiri rapat tersebut. Presiden Soekarno dan Wapres Hatta hadir dalam rapat tersebut, tetapi demi menghindari insiden dengan Jepang maka Presiden hanya berbicara pendek...

Sementara itu, peristiwa lainnya terjadi di Surabaya, yaitu peristiwa yang kemudian lebih dikenal sebagai *insiden bendera...* Dengan didasari semangat menegakkan kedaulatan negara, rakyat berbondong-bondong menuju ke Tunjungan menyerbu Hotel Yamato dan merobek warna biru bendera Belanda. Mereka mengibarakan kembali menjadi bendera Merah-Putih, bendera Indonesia. (Moedjanto, 101-102).

Pada kutipan di atas, sejak awal pengarang terlihat menonjolkan pemuda dalam usaha “menegakkan kemerdekaan” secara militer, melalui penarasian peran mereka sebagai inisiatif dan organisator rapat akbar di

lapangan Ikada, Jakarta dan perobekan bendera Belanda di hotel Yamato, Surabaya.

Usaha menonjolkan peran pemuda berkembang menjadi penonjolan peristiwa konflik fisik atau aksi-aksi militeristik melawan kekuatan asing ketika membahas kehadiran pasukan Sekutu di Indonesia. Semua buku teks membahas panjang lebar tentang aksi-aksi militeristik yang terjadi sepanjang periode revolusi kemerdekaan. Bahkan dinyatakan bahwa “Perbenturan bersenjata terjadi di seluruh Indonesia” (Notosusanto, dkk., 1981: 105). Alasan perang yang disusun pengarang antara lain adalah sebagai berikut.

Pemerintah dan rakyat Indonesia menerima baik kedatangan pasukan Serikat dengan catatan bahwa mereka tidak akan mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda. Namun ketika diketahui bahwa mereka membiarkan dirinya diboncengi oleh Belanda yang bermaksud untuk mengembalikan pemerintah kolonialnya, rakyat Indonesia terpaksa mengadakan perlawanan. Apalagi ketika mereka mempersenjatai serdadu-serdadu Belanda yang dibebaskan dari tawanan Jepang. Timbullah pertempuran di pelbagai tempat antara pihak Indonesia melawan pihak Inggris yang mewakili Serikat (Notosusanto, dkk., 1981: 106).

Kutipan di atas secara jelas menarasikan pandangan pengarang bahwa alasan perang adalah karena Sekutu atau Serikat “membiarkan dirinya diboncengi oleh Belanda yang bermaksud untuk mengembalikan pemerintah kolonialnya”. Bahkan pengarang menempatkan perang merupakan langkah yang “terpaksa” dilakukan, sebagai bentuk “perlawanan”.

Penarasian konflik fisik yang berupa perang selalu disertai dengan munculnya tokoh-tokoh yang digambarkan

menjadi pahlawan atau hero. Salah satu tokoh yang dipahlawankan oleh para pengarang buku teks adalah Sudirman. Ketika terjadi agresi Belanda 19 Desember 1948, Sudirman digambarkan sebagai berikut.

Dalam pada itu beberapa bulan sebelum Belanda menyerang, Jenderal Soedirman, Panglima Besar Angkatan Perang, menderita sakit paru-paru yang sangat parah sehingga harus dirawat di rumah sakit dan kemudian di rumah. Namun ketika situasi menjadi gawat, ia berkata bahwa jika Belanda menyerang kembali ia akan memegang kembali pimpinan Angkatan Perang dan memimpin prajurit-prajuritnya dalam suatu perlawanan gerilya. Janji itu ditepati. Pada saat Belanda menyerang, ia bangkit dari tempat tidurnya dan meminta diri kepada Presiden untuk pergi ke luar kota guna memimpin gerilya. Maka dengan diiringi oleh ajudan dan pasukan pengawalnya, Jenderal Soedirman naik gunung turun gunung, masuk hutan ke luar hutan, menempuh terik matahari dan curahan hujan lebat untuk memimpin perlawanan rakyat semesta terhadap musuh. Dalam masa yang paling gelap bagi Republik, Pak Dirman memberikan pegangan dan kekuatan batin kepada rakyat dan prajurit-prajurit yang berjuang habis habisan untuk kelangsungan hidup negaranya. MBKD dan MBKS segera diaktifkan di bawah panglimanya masing-masing. Pemerintah Militer memutar rodanya dengan lancar. Dengan demikian dimana masih ada prajurit TNI, di sana Republik Indonesia masih berdiri (Notosusanto, dkk., 1992, Jilid 3: 155).

Heroifikasi yang dilakukan pengarang antara lain terlihat dari penggambaran kondisi Jenderal Sudirman sebagai sedang "menderita sakit paru-paru yang sangat parah", tetapi tetap menepati janji untuk "naik gunung

turun gunung, masuk hutan ke luar hutan, menempuh terik matahari dan curahan hujan lebat untuk memimpin perlawanan rakyat semesta". Bahkan penulis menjadikannya sebagai tokoh yang mampu "memberikan pegangan dan kekuatan batin kepada rakyat dan prajurit" pada saat Indonesia sedang mengalami "masa yang paling gelap".

Tokoh lain yang oleh pengarang dimunculkan sebagai pahlawan periode revolusi kemerdekaan adalah Letnan Kolonel (Letkol) Suharto, yang menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1966-1998. Kepahlawanan Letkol Suharto yang pada waktu itu menjabat sebagai Komandan Wehrkreise III, terutama dalam peristiwa yang dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949. Dikisahkan bahwa kepahlawanan Letkol Suharto berusaha digambarkan oleh pengarang buku teks dengan menempatkannya sebagai tokoh yang "menetapkan untuk melancarkan serangan umum pada siang hari", dan "memimpin sendiri pertempuran pada pagi hari, tanggal 1 Maret 1949 itu, dengan menyandang senapan otomatis Qwengun MK 143 di bahunya". Serangan itu dapat "mengingatkan Belanda bahwa Republik Indonesia masih kuat dan tegak berdiri dan TNI sewaktu-waktu masih dapat memberikan pukulan maut kepada tentara Belanda", serta menjadi semakin hebat ketika "berita kemenangan serangan itu oleh para pejuang disiarkan ke luar negeri melalui radio di Wonosari, ke Bukittinggi (PDRI), ke Aceh, ke Rangoon (Birma), dan akhirnya ke New Delhi (India)" (Waridah, dkk., 2000: 252).

Untuk lebih meyakinkan pembaca akan kepahlawanan Letkol Suharto, Waridah (2000: 252-253) lebih lanjut menguraikan sebagai berikut.

...adanya serangan umum tanggal 1 Maret 1949 telah mengejutkan Belanda. Dunia mengakui bahwa RI

masih berdiri tegak. Peristiwa tersebut diabadikan dalam sebuah Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 yang terletak di depan gedung negara, pusat jantung kota Yogyakarta. Wujud monumen tersebut adalah sebagai berikut: (1) Lima buah patung menggambarkan wakil golongan dalam berjuang mempertahankan RI yaitu: TNI, pelajar, pedagang, petani, dan wanita.; (2) Patung singa mengandung arti angka satu; (3) Patung api berlidah tiga mengandung maksud bulan tiga atau bulan Maret; (4) Tulisan *jer basuki mawa bea* artinya untuk sukses harus ada korban. *Tetesing Ludiro Kusumoning Bawono* mengandung arti 1949 (bawono: 1, kusumo: 9, ludiro: 4, dan tetesing: 9)...

Keberhasilan serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949 (6 jam menguasai ibu kota perjuangan Yogyakarta) mempunyai makna nasional dan internasional. Peristiwa itu disiarkan oleh RRI dari Banaran Playen Gunungkidul, diteruskan ke Bukittinggi, ke Takengon Aceh, dari Aceh ke Rangoon Birma, ke New Delhi India, akhirnya sampai ke New York. Yang dimaksudkan dengan makna nasional, adalah bahwa peristiwa tersebut menambah kepercayaan masyarakat Indonesia untuk tetap merdeka dan mengakui semangat perjuangan rakyat melawan Belanda. Adapun yang dimaksud dengan makna internasional adalah bahwa peristiwa tersebut menjadi pendorong pengukuhan eksistensi RI oleh Dewan Keamanan PBB.

Dengan menunjukkan adanya monumen, pengarang bermaksud menggambarkan bahwa seakan-akan Serangan Umum 1 Maret 1949 sungguh-sungguh merupakan pertempuran yang dahsyat. Bahkan pengarang juga memberikan data tentang korban perang, meski sama sekali tidak secara khusus menunjuk korban Serangan Umum 1 Maret 1949. Pada bagian akhir dari kutipan, pengarang berusaha menun-

jukkan bahwa peristiwa tersebut sangat besar maknanya, yaitu secara nasional mampu “menambah kepercayaan masyarakat Indonesia untuk tetap merdeka” dan secara internasional berhasil “menjadi pendorong pengukuhan eksistensi RI oleh Dewan Keamanan PBB”.

Penonjolan perjuangan fisik yang disertai dengan heroifikasi terhadap tokoh-tokoh militer yang terlibat di dalamnya juga dilakukan dengan melalui pendistorsian dan penegasian terhadap berbagai peristiwa historis non fisik, yaitu perjuangan diplomasi. Distorsi dan negasi tampak antara lain dilakukan oleh Notosusanto (1992: 145) yang buku karangannya menjadi buku paket, ketika menggambarkan Persetujuan Linggarjati sebagai berikut.

Dalam bulan November 1946 diselenggarakan perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda di Linggarjati (atau Linggarjati), sebuah tempat peristirahatan di sebelah selatan Cirebon. Persetujuan Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 itu berisi antara lain: (1) Pemerintah RI dan Belanda bersamasama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara yang berbentuk federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS), (2) Pemerintah RIS dan Pemerintah Belanda akan bekerja sama dalam sebuah perserikatan negara yang bernama Uni Indonesia-Belanda.

Sesudah Persetujuan Linggarjati ditandatangani, hubungan RI-Belanda semakin memburuk. Oleh pihak kolonialis Belanda, Persetujuan Linggarjati memang hanya dianggap sebagai alat untuk memungkinkan mereka mendatangkan pasukan-pasukan yang lebih banyak dari negerinya. Setelah mereka merasa cukup kuat, mereka beralih kepada maksud semula, yakni menghancurkan Republik dengan kekuatan senjata.

Pada kutipan di atas tampak pengarang dengan bersembunyi di balik kata “antara lain” secara sengaja hanya menampilkan dua isi perjanjian. Notosusanto dengan sengaja menyembunyikan isi perjanjian Linggarjati yang sangat penting, yaitu “Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatra”, untuk mendistorsi dinamika historis perjuangan diplomasi. Pengakuan akan eksistensi RI itu merupakan isi perjanjian yang paling penting dan menjadi tujuan utama perjuangan para diplomat Indonesia. Perdana Menteri Syahrir, jauh sebelum perundingan Linggarjati diadakan telah menyatakan bahwa permusyawaratan Indonesia dengan Belanda bisa dilakukan sesudah Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Pernyataan itu secara lengkap dimuat oleh surat kabar *Berita Indonesia* pada tanggal 5 Desember 1945.

Dari berita surat kabar tersebut dapat dilihat bahwa pemimpin nasional menghendaki penyelesaian konflik dengan Belanda melalui perundingan yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) dan bukan dengan jalan kekerasan seperti yang telah ditempuh oleh Belanda. Untuk tujuan itulah, para pemimpin nasional Indonesia menempatkan pengakuan kemerdekaan sebagai tujuan utama perjuangan, seperti disampaikan oleh Presiden Soekarno dalam nota balasan kepada van Mook tertanggal 12 Maret 1946 yang antara lain berisi tuntutan bahwa “Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berkedaulatan penuh atas wilayah bekas jajahan Hindia Belanda” Waridah (2000, Jilid 2: 242)

Selain mendistorsi, Notosusanto (1981/1992) juga berusaha menegasikan Perjanjian Linggarjati. Pernyataan bahwa oleh pihak kolonialis Belanda, Persetujuan Linggarjati memang hanya

dianggap sebagai alat untuk memungkinkan mereka mendatangkan pasukan-pasukan yang lebih banyak dari negerinya. Setelah mereka merasa cukup kuat, mereka beralih kepada maksud semula, yakni menghancurkan Republik dengan kekuatan senjata” lebih merupakan pandangan yang terlalu dipaksakan untuk memberi kesan negatif terhadap isi Perjanjian Linggarjati. Pernyataan tersebut mengingkari realitas historis yang menunjukkan bahwa sejak pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan RI melalui Perjanjian Linggarjati, berbagai negara menjadi ikut mengakuinya, seperti ditulis oleh Idris (1979: 72) sebagai berikut.

Untuk Indonesia pengakuan ini yang pertama-tama diberikan oleh Inggris pada tanggal 31 Maret 1947. Kemudian disusul oleh: Amerika Serikat, 17 April 1947; Mesir, 11 Juni 1947; Libanon, 29 Juni 1947; Syria, 2 Juli 1947; Afghanistan, 23 September 1947; Burma, 23 Nopember 1947; Arab Saudi, 24 Nopember 1947; Yaman, 3 Mei 1948; dan Uni Sovyet, 26 Mei 1948

Meski oleh pengarangnya tidak dimaksudkan untuk menjelaskan akibat Perjanjian Linggarjati, tetapi fakta historis yang dimunculkannya sangat berguna. Dari urutan waktu pada kutipan di atas tampak bahwa Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 memiliki pengaruh besar. Kurang dari sepekan, Inggris kemudian ikut mengakui kemerdekaan RI dan disusul oleh Amerika Serikat.

Selain eksistensi RI memperoleh pengakuan secara internasional, Perjanjian Linggarjati juga memungkinkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk ikut terlibat dalam usaha menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. Dengan kata lain, pengakuan Belanda atas eksistensi RI melalui Perjanjian

Linggarjati, menjadi prasyarat bagi masuknya PBB. Dari sudut pandang ini, pengakuan kemerdekaan sebagai tujuan utama perjuangan yang dicanangkan oleh pemimpin nasional menjadi lebih dapat dipahami, sekaligus pemahaman bahwa hasil Perjanjian Linggarjati merupakan prestasi besar yang diukir semasa Syahrir menjadi Perdana Menteri.

Di lain pihak, langkah Belanda melakukan "aksi polisionil" pasca penandatanganan Perjanjian Linggarjati lebih merupakan ekspresi kegusaran terhadap blunder politik, yaitu pengakuan terhadap kemerdekaan RI, oleh para diplomatnya. Akan tetapi, langkah militer itu tidak mampu mengembalikan posisi RI kembali menjadi "Hindia Belanda". Konflik Indonesia-Belanda telah menjadi permasalahan antar dua negara merdeka yang secara hukum internasional sah untuk PBB campur tangan.

Distorsi dan negasi juga terjadi pada saat buku teks menguraikan hasil-hasil perundingan Renville. Moedjanto (1992, Jilid 3: 109 -110) saat membahas isi perjanjian Renville, antara lain menyatakan sebagai berikut.

Pada perkembangan berikutnya, hanya melalui desakan KTN, Pemerintah RI terpaksa menyetujui isi Persetujuan Renville yang amat menguntungkan Belanda itu. Dari Renville, RI menyetujui dibentuknya Negara Indonesia Serikat dengan masa peralihan sehingga secara tidak langsung pendudukan Belanda atas beberapa daerah RI mendapatkan pembenaran. Daerah-daerah itu akan diklaim oleh Belanda dan diakui oleh RI sampai diselenggarakan *plebisit* (penentuan pendapat rakyat = pepera) untuk menentukan apakah rakyat mau bergabung dengan RI atau tidak. Selain itu, pihak RI juga bersedia menarik pasukan-pasukan TNI dari daerah-daerah pendudukan Belanda atau kantong-kantong gerilya ke wila-

yah yang masih bersisa milik RI. Ini merupakan satu kekalahan terbesar dari sebuah perjanjian, namun perlu disadari bahwa dalam percaturan politik tingkat tinggi hal tersebut tidak bersifat mutlak dan tetap. Sejarah revolusi belum berakhir, tetapi baru sampai pada *jeda* tertentu yang masih akan berlanjut. Dalam masa jeda RI dapat menyusun kembali kekuatan dan siasat perjuangan yang baru.

Persetujuan Renville yang amat merugikan RI itu ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Walaupun dengan berat hati, itikad baik untuk mematumhinya, memaksa pasukan-pasukan TNI meninggalkan dan mengosongkan daerah gerilya di belakang garis van Mook yang sangat luas. Seperti kita ketahui garis itu menghubungkan satu daerah terdepan yang dikuasai Belanda dengan daerah terdepan lainnya. Sementara disebut daerah "kantong" adalah daerah RI yang ada di belakang garis van Mook. Dari Jawa Barat ada sekitar 35.000 orang tentara anggota Divisi Siliwangi dihijrahkan menuju daerah RI di Jawa Tengah, di antaranya ditempatkan di Sala. Begitu juga dalam skala lebih kecil, kurang lebih 6.000 tentara dari Jawa Timur juga dibawa menuju Jawa Tengah atau Yogyakarta, yang sejak tanggal 4 Januari 1946 telah menjadi ibukota RI.

Pada kutipan di atas secara jelas merepresentasikan pandangan pengarang bahwa pemerintah RI berada di bawah "desakan KTN", sehingga bersedia menandatangani Perjanjian Renville yang "amat menguntungkan Belanda" dan "amat merugikan RI". Bahkan dengan sangat tegas pengarang menyatakan bahwa Perjanjian Renville "merupakan satu kekalahan terbesar dari sebuah perjanjian".

Pola narasi yang menonjolkan perjuangan fisik atau militer dan heroifikasi terhadap tokoh terkait, serta distorsi dan negasi terhadap peran sipil yang

dilakukan oleh para pengarang buku teks pelajaran sejarah tidak berjalan sendiri. Pola itu merupakan bagian dari sebuah "gerakan" besar yang disponsori pemerintah Orde Baru. Gerakan itu adalah mempromosikan sejarah militer kepada seluruh komponen bangsa, terutama generasi muda. Sejarah militer pada masa Orde Baru dikembangkan oleh lembaga kemiliteran dengan tokoh utama A.H. Nasution dan Nugroho Notosusanto (Adam dalam Nordholt dkk, 2008). Sejarah militer mewacanakan peran penting militer, terutama Angkatan Darat dalam berbagai peristiwa sejarah di Indonesia. Mereka menempatkan militer sebagai pahlawan bagi bangsa dan negara Indonesia, terutama ketika menghadapi masa-masa krisis.

Salah satu instruksi yang diberikan oleh Seminar Angkatan Darat 1972 kepada militer ialah agar mereka mengedarkan versi mereka sendiri kepada masyarakat Indonesia melalui memoar, film, museum, monumen, dan buku pelajaran sejarah. Yang menjadi sasaran proyek-proyek ini ialah generasi muda agar mereka menghargai apa yang telah dilakukan oleh Generasi 1945, yang kemudian mendominasi posisi-posisi yang paling senior dalam rezim. Dalam proyek-proyek sejarah yang baru ini, militer berfokus kepada memajukan peran mereka sebagai pahlawan dan pemimpin perjuangan kemerdekaan 1945-1949 dan mempromosikan nilai-nilai militeristik pada umumnya (McGregor, 2008: 249).

Dari kutipan di atas secara jelas dapat disimak bahwa salah satu instruksi dari Seminar Angkatan Darat 1972 kepada militer adalah untuk mengedarkan sejarah versi militer kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Penyebaran dilakukan melalui memoar, film, museum, monumen,

dan buku pelajaran sejarah. Sasaran penyebaran terutama adalah generasi muda, agar mereka menghargai apa yang telah dilakukan oleh Generasi 1945. Dari sudut pandang ini, dapat diambil pemahaman bahwa buku teks pelajaran sejarah sejak kurikulum 1975 menjadi salah satu media pewarisan nilai-nilai dalam semangat 1945, seperti diamanatkan oleh Tap MPR No: IV/MPR/1973. Nilai 1945 antara lain adalah rela berkorban, persatuan dan kesatuan, kerjasama, saling menghargai, dan cinta tanah air (Badrika, 1997: 315-316).

Secara historis, pengaruh pandangan militeristik terhadap produksi buku teks pelajaran sejarah dimulai dengan penunjukkan Nugroho Notosusanto sebagai kepala tim riset buku sejarah untuk sekolah menengah sebagai berikut.

Pada tahun 1974, Menteri Pendidikan mengangkat Nugroho dan anggota staf yang lain sebagai kepala tim riset untuk buku sejarah bagi sekolah menengah. Staf Pusat Sejarah ABRI juga membantu menyiapkan buku teks sejarah untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dari tahun 1975/1976 dan untuk pendidikan tinggi dari tahun 1970-1974. Pusat Sejarah ABRI juga berperan serta dalam evaluasi buku-buku untuk perpustakaan sekolah dan dalam merancang kurikulum sejarah untuk sekolah (McGregor, 2008: 271-272).

Dari kutipan di atas tampak bahwa pengaruh militer cukup mendalam, baik pada penyusunan buku teks maupun kurikulum pelajaran sejarah.

Gerakan mempromosikan sejarah militer tidak berhenti dengan menyusun buku teks pelajaran yang sesuai dengan selera penguasa. Pada kurikulum 1984, pemerintah memunculkan mata pelajaran baru yang dikenal sebagai Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Untuk pelaksanaan mata pel-

jaran PSPB tersebut, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 290a/U/1985 tanggal 8 Juli 1985 dan No. 216/C/Kep/1985 tanggal 7 November 1985 yang berisi tentang pelaksanaan mata pelajaran PSPB dan GBPP PSPB.

Seperti pada mata pelajaran sejarah untuk periode revolusi kemerdekaan, materi PSPB juga menekankan pada fenomena historis yang menonjolkan perjuangan fisik. Perbedaannya, PSPB mencakup periode sejarah yang lebih luas, yaitu mulai dari Tanam Paksa sampai dengan Orde Baru. Untuk periode revolusi kemerdekaan, isi keduanya relatif sama. Sebagai contoh adalah saat membahas perundingan Indonesia-Belanda, antara lain dipaparkan sebagai berikut.

Dengan penengah Lord Killearn, perundingan Indonesia - Belanda diadakan lagi di Linggajati, di kaki Gunung Cereme, Cirebon sejak tanggal 10 November 1946. Hasil perundingan diparaf kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947. Isi pokoknya adalah: (1) Belanda mengakui secara de facto kedaulatan Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949 Belanda harus sudah meninggalkan daerah de facto; (2) Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat. Pemerintah RI merupakan salah satu negara bagian dari negara Indonesia Serikat; (3) Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua Uni (Lestariyono, 1988: 6).

Kesamaan isi terutama ketika menyangkut fakta-fakta keras, seperti tanggal kejadian dan isi perjanjian. Akan tetapi, menyangkut gaya bahasa dan interpretasi historis, buku teks PSPB

terlihat lebih provokatif, seperti dapat disimak dari kutipan berikut.

Nyata sekali dalam tiap perundingan. Belanda selalu memaksakan kemauannya menjajah kembali bangsa dan negara Indonesia. Sebaliknya bangsa Indonesia bertekad mempertahankan Proklamasi, dan menjadi bangsa merdeka selamanya. Persetujuan Linggajati yang jelas-jelas merugikan Indonesia pun masih diingkari Belanda dengan melancarkan Agresi Militer I. Perjuangan bangsa Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebabkan Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata dan atas usul Amerika dibentuk Goodwill Commission (Komisi Jasa-Jasaa Baik), yang kemudian terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara (KTN) untuk membantu menyelesaikan persengketaan Indonesia Belanda.

KTN berhasil mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam perundingan Renville. Persetujuan Renville yang juga sangat merugikan Republik Indonesia itu masih dilanggar Belanda dengan melancarkan agresi militer II terhadap RI. Semua kota di Indonesia, bahkan Yogyakarta, ibu kota negara RI pada waktu itu diduduki pasukan penjajah Belanda

Rakyat Indonesia sama sekali tidak gentar menghadapi Belanda yang mempunyai persenjataan modern menurut ukuran saat itu. Perlawanan tidak dihentikan, bahkan makin berkobar. Dengan bergerilya pasukan Indonesia terus-menerus melancarkan serangan terhadap kedudukan Belanda. Belanda terkepung. Bahkan kota Yogyakarta yang sudah diduduki Belanda itu pada tanggal 1 Maret 1949 sempat direbut dan diduduki pasukan gerilya Indonesia selama enam jam di bawah komando Letnan Kolonel Suharto (sekarang Presiden RI) (Lestariyono, 1988: 7-8).

Dari realitas yang berlaku tidaklah

mengerankan apabila penelitian Darmiasti (2002: 127) mengambil kesimpulan bahwa PSPB merupakan buku teks yang bersifat ideologis. Sejarah diajarkan bagi siswa di sekolah bukan sebagai pengetahuan belaka, tetapi sejarah ditampilkan sebagai upaya untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Oleh karena itu, kebenaran sejarah ditentukan oleh pemerintah. Peristiwa-peristiwa sejarah yang ditampilkan dalam PSPB pun lebih banyak peristiwa politik yang dianggap memiliki nilai patriotisme.

Wacana militeristik menjadikan revolusi kemerdekaan digambarkan hanya sebagai usaha mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing, baik Jepang sebagai penjaga status quo, Sekutu sebagai pemenang perang maupun NICA yang berusaha menjajah kembali Indonesia. Berbagai fenomena historis yang terjadi di daerah tidak dapat dimasukkan ke dalam buku teks pelajaran sejarah, hanya karena bukan perjuangan melawan kekuatan asing. Salah satu fenomena yang tidak ada dalam buku teks adalah revolusi sosial yang terjadi antara lain di Sumatera Timur dan Surakarta. Di Sumatera Timur revolusi sosial meletus pada tanggal 3 Maret 1946. Pada awalnya masyarakat bermaksud menghadang Belanda (NICA) yang dikabarkan akan mendarat di Tanjung Balai. Ketika NICA tidak jadi datang, massa rakyat beralih sasaran ke kaum bangsawan Melayu, karena dianggap memihak penjajah Belanda.

Di pihak lain, pada revolusi sosial di Surakarta yang meletus pada bulan Oktober 1945, rakyat menghendaki pemerintahan dalam bentuk swapraja. Pada Oktober itu juga, penasihat Sunan Pakubuwana XII, KRMH Sosrodiningrat, diculik dan dibunuh. Bupati-bupati di Daerah Istimewa Surakarta yang masih kerabat Kraton diturunkan oleh massa. Pada April 1946, penasihat

Sunan yang baru, KRMT Yudonagoro, juga diculik dan dibunuh bersama sembilan pejabat di Kepatihan. Dengan berdasar perkembangan situasi itu, maka pada tanggal 16 Juni 1946 pemerintah mengakhiri status Surakarta sebagai Daerah Istimewa dan menggantinya sebagai karesidenan.

Berbeda dengan pada kedua daerah di atas, pada tiga daerah di Jawa Tengah, yaitu Pemasang, Tegal dan Brebes massa rakyat melakukan revolusi sosial terhadap birokrasi pemerintahan dari tingkat residen sampai kepala desa. Revolusi sosial yang meletus pada bulan Agustus 1945 dan terkenal sebagai Peristiwa Tiga Daerah itu didorong oleh dendam kepada para pejabat pemerintahan, karena dianggap menjadi kepanjangan tangan penjajah. Mereka menempatkan rakyat hanya sebagai sapi perahan.

Dinamika yang begitu kaya di berbagai daerah tidak mampu dicantumkan oleh buku teks pelajaran sejarah, sehingga keberagaman menjadi tidak dapat terwacanakan dengan optimal. Akibatnya siswa sebagai pembaca akan memperoleh kesan bahwa masa revolusi kemerdekaan hanya berisi tentang perlawanan masyarakat terhadap pasukan Jepang dan Sekutu/NICA. Tanpa bermaksud menafikan pentingnya nilai-nilai patriotisme, dominasi narasi tentang aksi-aksi militeristik akan menyampaikan pesan kepada para siswa SMA sebagai pembacanya bahwa perang merupakan solusi terbaik bagi permasalahan Indonesia pada periode revolusi kemerdekaan.

Sebaliknya, penegasian terhadap peran diplomasi yang dijalankan oleh para pemimpin nasional akan menyampaikan pesan bahwa diplomasi merupakan solusi terjelek, karena hanya menghasilkan kerugian bagi bangsa Indonesia. Dengan wacana militeristik yang diproduksi oleh buku teks pela-

jaran sejarah akan mengembangkan karakter generasi muda yang memuja kekerasan sebagai jalan untuk memperoleh kebenaran, dan bukan diskusi kritis seperti diwacanakan oleh Habermas (McCarthy, 2009).

SIMPULAN

Dalam buku teks pelajaran sejarah SMA periode kurikulum 1975 – 1994. Pengaruh militer dilakukan dengan menonjolkan peristiwa-peristiwa historis periode revolusi kemerdekaan yang merepresentasikan konflik fisik. Penonjolan peran militer dalam sejarah revolusi kemerdekaan dilakukan bersamaan dengan peminggiran peran sipil, baik dengan jalan negasi maupun distorsi. Peminggiran peran sipil paling tampak pada penegasian keberhasilan Syahrir dalam memperoleh pengakuan kemerdekaan RI melalui Perjanjian Linggarjati (25 Maret 1947). Selain meminggirkan peran sipil, sejarah yang militeristik juga gagal menggambarkan kekayaan nuansa yang terjadi selama revolusi kemerdekaan, seperti terjadinya revolusi sosial yang terjadi di Sumatera Timur, Surakarta, Pematang, Tegal dan Brebes. Dengan wacana militeristik itu akan mengembangkan karakter generasi muda yang memuja kekerasan sebagai jalan untuk memperoleh kebenaran

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. 1991. *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. New York: Verso.
- Berita Indonesia pada tanggal 5 Desember 1945
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Seminar Sejarah Nasional V: Sub Tema Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Derrida, Jacques. 1997. *Of Grammatology*. Translated by Gayatri Chakravorty Spivak. London: The Johns Hopkins University Press
- <http://www.merriam-webster.com/dictionary/image?show=0&t=1286555314>
- Kartodirdjo, Sartono. 2005. *Sejak Indische sampai Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Lestariyono. 1988. *Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jilid 2. Klaten: Intan Pariwara.
- McCarthy, Thomas. 2009. *Teori Kritis Jurgen Habermas*. Terjemahan Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- McGregor, Katharine E. 2008) *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusun Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia
- Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari, ed.. 2008. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Renan, Ernest. 1882. "What is A Nation?" dalam Woolf, Stuart, (ed.). 1996. *Nationalism in Europe, 1815 to Present*. London: Routledge.
- Wiriaatmadja, Rochiati. 1992. "Peranan Pengajaran Sejarah Nasional Indonesia Dalam Pembentukan Identitas Nasional". *Disertasi*. Bandung: Program Pascasarjana IKIP Bandung.

Buku Teks Pelajaran Sejarah (Subjek Penelitian)

- Badrika, I Wayan. 1997. *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum untuk SMA*, Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Idris, Z.H., dan Tugiyono. 1979. *Sejarah Untuk SMA*. Jakarta: Mutiara
- Moedjanto, G., Nani Sunarti, Chr. Kristanto Dh., Anton Haryono dan AA Padi. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid 3. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Nugroho Notosusanto dan Yusmar Basri, (ed.). 1981 dan 1992. *Sejarah Nasional*

- Indonesia Untuk SMA*. Jilid 3. Buku paket. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sardiman, A.M., dan Kusriyantinah. 1996. *Sejarah Nasional dan Umum untuk SMA*, Jilid 2b dan 2c. Surabaya: Kendang Sari
- Siswojo, S.W. 1979. *Sejarah Untuk SMA*, Jilid 1. Klaten: Intan
- Soewarso, Ibnoe. 1986. *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*. Jilid 3. Surakarta: Widya Duta.
- Waridah Q., Siti, J. Sukardi, P. Sunarto, dan Rubiyatno. 2000. *Sejarah Nasional dan Umum untuk SMA*. Jilid 2. Jakarta: Bumi Aksara